

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

AUREL AULIA KURNIAWAN

E051 171 004



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Disusun dan diajukan oleh

Aurel Aulia Kurniawan
E 051 171 004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Jum'at, 19 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
NIP. 19630912 198702 2001

Pembimbing Pendamping



Rahmatullah, S.IP, M.Si.
NIP. 19770513 200312 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640712 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Aurel Aulia Kurniawan







E 051 171 004

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 19 Februari 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Aurel Aulia Kurniawan
NIM : E051171004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan



AUREL AULIA KURNIAWAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatuliah Wabarakaatu, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, berbagai cobaan, kesulitan, dan hambatan yang penulis temui sejak dari awal pembuatan skripsi ini hingga menjelang penyelesaiannya. Namun dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta, kasih sayang yang tak terhingga dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua

orang tua penulis, yakni ibunda Darmawati dengan ayahanda Roni Heru Kurniawan, S.E, juga tante yang sudah seperti ibu kedua untuk penulis Alm.Hasnah Dahlan, Nurjannah dan Dahlia atas segala perjuangan mendidik, membesarkan penulis sampai pada saat ini, memberikan dukungan serta doa yang tulus dan tak kenal lelah kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi, serta Saudara saya Agung, Dinda, Carlos dan terkhusus Kakak saya Ayu yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan studi. Terima kasih atas nilai-nilai kehidupan yang senantiasa diberikan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang terus berusaha melayakkan diri sebagai manusia yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT, memberikan kesehatan, dan melindungi setiap langkah kehidupan kepada keluarga penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.

3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi.
4. Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada Staf Departemen Ilmu Pemerintahan bapak Mursalim, S.IP dan Staf Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administratif penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru, Pemerintah Kelurahan Palanro, Pemerintah Desa Cilellang Dan Pemerintah Desa Nepo.

9. Terima kasih untuk sepupu penulis Magfira yang ikut serta membantu dan menemani dalam melaksanakan penelitian.
10. Terima kasih untuk sahabat sejak sekolah menengah atas (Vs, Gesat, Tsf) penulis Suci, Nurul, Vina, Putri, Rina, Akmal, Irham, Syahrul, Supardi, Akbar, Rijal, Kurniawan, Erwin, Rasmi, Ria, dan Syarifah yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Saudara Happy Lepas : Sabrina, Astry, Ilmi dan Windy sahabat seperjuangan peneliti selama ini telah bersama suka maupun duka hingga akhir perjuangan di bangku perkuliahan yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, memberikan rasa nyaman kepada penulis ditempat perantauan. Tak hentinya memberikan semangat dan perhatian yang tulus kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Segala keceriaan, tawa bahkan konflik telah kita dilalui. Semoga kebersamaan tetap terjalin di setiap langkah kehidupan kita kedepannya.
12. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan penulis Ilmu Pemerintahan “Kaizen” 2017 : Ari, Farhan, Alfa, Alam, Apri, Bahrul, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Wawan, Razak, ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifah, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Uni, Ulfi dan Widy atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta

persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika telah di hadapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah di lewati mengantarkan kita pada segala impian dan cita-cita yang di tuju. Kesabaran atas apapun yang saya lakukan telah membantu mengembangkan saya menjadi seperti saya hari ini. Tak akan ada kata selamat tinggal untuk persaudaraan tiada akhir.

13. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, Eleftheria 2018 dan Zeitgeist 2019 telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang terkikis masa.

14. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Barru 2 Gelombang 104 : ryan, ilo, zima, nain, hadi, said, Priska, ramlah, tommy, mono, elena, wiah, cica, nini, fira, ani, syandi dan diba. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman selama proses pelaksanaan KKN di Kabupaten barru. Semoga tetap diberi kesehatan dan waktu tetap sudi untuk mempertemukan.

Makassar, 23 Februari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Analisis	13
2.2 Pentingnya Perpustakaan.....	14
2.3 Pengelolaan Perpustakaan.....	18
2.4 Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan	23
2.5 Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan ..	24
2.6 Pola Kemitraan/Hubungan Kerja	27
2.7 Kerangka Konsep.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2 Tipe Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Informan Penelitian	36

3.6	Teknik Analisis Data.....	38
3.7	Fokus Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Barru.....	48
4.1.1	Sejarah Kabupaten Barru.....	48
4.1.2	Keadaan Geografis Kabupaten Barru.....	51
4.1.3	Keadaan Topografis Kabupaten Barru	54
4.1.4	Kependudukan	56
4.1.5	Visi dan Misi Kabupaten Barru.....	57
4.2	Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten barru	59
4.2.1	Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru	59
4.2.2	Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru	60
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten barru	61
4.2.4	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	62
4.3	Gambaran Umum Kecamatan Mallusetasi.....	64
4.3.1	Sejarah Kecamatan Mallusetasi	64
4.3.2	Luas Wilayah Kecamatan Mallusetasi.....	70
4.3.3	Visi dan Misi Kecamatan Mallusetasi	72
4.3.4	Penduduk.....	73
4.4	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
4.4.1	Kelurahan Palanro.....	75
4.4.2	Desa Cilellang.....	76
4.4.3	Desa Nepo.....	80
4.5	Hasil Penelitian.....	85
4.5.1	Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	85
4.5.1.1	Perencanaan Perpustakaan Desa/Kelurahan.....	85

4.5.1.2	Pelaksanaan Perpustakaan Desa/Kelurahan.....	91
4.5.1.3	Pengawasan Perpustakaan Desa/Kelurahan.....	107
4.5.1.4	Pelaporan Perpustakaan Desa/Kelurahan.....	112
4.5.1.5	Penganggaran Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.....	117
4.5.2	Pola Kemitraan Antara Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		139
5.1	Kesimpulan.....	139
5.2	Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....		155
LAMPIRAN.....		158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kab.Barru ..	53
Tabel 2.	Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerangan Kab.Barru.....	55
Tabel 3.	Keadaan Wilayah Berdasarkan Ketinggian di atas Permukaan Laut	55
Tabel 4.	Data Kependudukan Kabupaten Barru.....	56
Tabel 5.	Data Luas Wilayah Kecamatan Mallusetasi	71
Tabel 6.	Data Penduduk Kecamatan Mallusetasi.....	73
Tabel 7.	Koleksi Total Buku di Perpustakaan Kel.Palanro, Desa Cilellang dan Desa Nepo.....	94
Tabel 8.	Laporan triwulan kondisi dan jumlah buku	115

Tabel 9. Anggaran Insentif Petugas Perpustakaan Desa/Kelurahan Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru.....	121
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep	33
Gambar 2. Peta Kabupaten Barru.....	55
Gambar 3. Peta Kecamatan Mallusetasi	72
Gambar 4. Peta Desa Cilellang.....	79
Gambar 5. Grafik Pengunjung Perpustakaan Desa/Kelurahan.2020	95
Gambar 6. Grafik Laporan Pengunjung Perpustakaan Desa/Kelurahan	114

ABSTRAK

AUREL AULIA KURNIAWAN, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Dibimbing Oleh Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru beserta pola kemitraan/ hubungan kerjasamanya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Kecamatan Mallusetasi melalui hubungan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran penyelenggaraan Perpustakaan masih belum terlaksana dengan optimal, serta pola kemitraan/ hubungan kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan perpustakaan Desa/Kelurahan telah terjalin dengan baik.

Kata Kunci : Analisis, Pengelolaan, Perpustakaan.

ABSTRACT

AUREL AULIA KURNIAWAN. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title: Analysis Management Library of Village/Sub-distrik in Mallusetasi Distrik Barru Regency (supervised by Prof. Dr. Nurlinah, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si)

This study aims to determine and analysis how the management library of Village/Sub-distrik in Mallusetasi Distrik Barru Regency with the pattern of partnership/cooperative relations with the Barru Regency Library and archives auuthorities

This type of research is descriptive qualitative research, which is intended for exploration and clarification of a social phenomenon or reality, by describing the data and facts relating to the problem and the unit under study. The purpose of this research was to determine and analyze how the management of the local Library in Mallusetasi District in Barru Regency and the pattern of partnerships with the Barru Regency Library and Archives Authorities.

The results of this study indicate that the management library of Village/Sub-distrik in Mallusetasi Distrik Barru Regency in terms of planning, impelementation, supervision, reporting, and library management budgeting has not been implemented optimal, with the pattern of partnership/cooperative relations with the Barru Regency Library and archives auuthorities with Library of Village/Sub-distrik has been well established.

Keywords: Analysis, Management, Library.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu inti tujuan dari kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup cerdas. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk membebaskan warga negaranya dari kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus juga berkewajiban menjamin dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Masyarakat membutuhkan sarana untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan serta pengetahuannya agar hidupnya menjadi semakin cerdas, berkualitas dan mampu berkompetisi dalam percaturan global.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya manusia. Tinggi rendahnya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan menyimpan khazanah budaya bangsa atau masyarakat tempat perpustakaan berada, juga meningkatkan nilai dan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya melalui proses penyediaan bahan bacaan. Keberadaan perpustakaan dalam masyarakat sangat diperlukan sedangkan perpustakaan tanpa masyarakat jelas tidak bisa berdiri

sendiri. Pada dasarnya perpustakaan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, mulai dari keluarga, kaum professional sampai institusi pemerintah maupun swasta (Sullistyo-Basuki, 1996). Perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi menjadi tulang punggung berkembangnya pengetahuan masyarakat. Informasi didalamnya merupakan aset penting bagi peradaban masyarakat¹.

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak, dan karya rekam lainnya. Serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Pemerintah memberdayakan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi, salah satunya perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah termasuk kedalam perpustakaan umum, hal ini dikarenakan perpustakaan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal adanya perbedaan status sosial masyarakat. Tertuang juga pada Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Bab VII Pasal 22(1) yang berbunyi Perpustakaan umum

¹ Wiji Suwarno, *Perpustakaan & Buku*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat².

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa bidang perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Barru. Perihal perpustakaan dan kearsipan dikembangkan atas dasar prinsip yang sama yaitu penghargaan terhadap kehidupan bersama. Utamanya dalam bidang perpustakaan yang tujuan utamanya memastikan agar semua bentuk budaya dan ilmu pengetahuan dapat dengan mudah dan cepat dihimpun agar dikemudian hari dapat ditelusuri, dikaitkan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga terbentuk masyarakat yang berkeadilan dan berpengetahuan.

Desa/kelurahan merupakan lembaga pemerintahan dengan wilayah hukum yang berada pada posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Setiap desa/kelurahan di seluruh wilayah nusantara mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat strategis karena menyatu dengan masyarakat dalam kehidupan desa yang harmonis, selaras dan seimbang. Sebuah kehidupan dengan nilai-nilai,

² Undang-undang No 43 Tahun 2007 Bab VII Pasal 22(1)

norma, budaya, adat-istiadat, kekerabatan, kearifan lokal, dan nuansa religius serta keramahan lingkungan. Desa/Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu dilengkapi, difasilitasi, dan didukung dengan pembentukan lembaga-lembaga layanan sosial dan layanan publik. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Salah satu lembaga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat yaitu perpustakaan. Menurut definisi UU No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka³. Di era sekarang, keberadaan perpustakaan di Indonesia dirasa sangat penting mengingat fungsinya sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa⁴.

Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah mengembangkan kehidupan masyarakat. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan sangat penting, hal ini dikarenakan

³ Undang-Undang No.43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1

⁴ Undang-Undang No.43 Tahun 2007 Pasal 3

perpustakaan desa/kelurahan berada dekat dengan masyarakat. Perpustakaan Desa/kelurahan diperuntukkan bagi masyarakat dan dikelola oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi. Bahwa seperti yang diketahui setiap manusia mempunyai kebutuhan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini berlaku untuk masyarakat kota maupun masyarakat desa, walau mungkin bentuk informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan berbeda. Untuk menjadi manusia pembelajar memerlukan dukungan, baik dari pemerintah maupun lingkungan. Dukungan ini dapat berupa fasilitas atau dukungan moral. Agar pemberian dukungan ini dapat mengena, maka diperlukan pendekatan kepada masyarakat untuk memahami informasi apa yang diperlukan.

Istilah standar dalam Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan⁵. Maka yang dimaksud dengan standar perpustakaan adalah suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan agar perpustakaan berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada Pasal 2 yang mengatur tentang 6 Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan⁶. Dari 6 Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, Standar Pengelolaan

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*

⁶ Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada Pasal 2

Perpustakaan menjadi representasi kelima standar lainnya. Dalam proses Pengelolaan telah mencakup beberapa hal, yakni perencanaan ,pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran pelayanan perpustakaan.

Pengelolaan perpustakaan menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada bagian perencanaan, perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan serta perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan. Kemudian pada bagian Pelaksanaan, pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel serta pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku. Selanjutnya pada bagian pengawasan dijelaskan bahwa pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi dan pelaporan serta supervise dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas perpustakaan. Yang terakhir, penganggaran penyelenggaraan perpustakaan meliputi perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan,pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan, anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa,

anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat serta Kepala perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan dan penggunaan anggaran.

Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada yaitu melalui kegiatan kerjasama perpustakaan yang dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan desa oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru. Rancangan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan melalui kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan sejumlah perpustakaan desa/kelurahan. Dengan wujud kerja sama berupa pembinaan/pelatihan, pengembangan, pemberdayaan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dan membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan yang pada akhirnya bermuara sebagai bentuk upaya meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan.

Dari kondisi yang seharusnya terjadi diatas, pada kenyataannya dalam pengelolaan perpustakaan pada bagian perencanaan didapati beberapa perpustakaan desa/kelurahan tidak menyusun program kerja tahun dan program kerja bulanan. Kemudian pada bagian pelaksanaan desa/kelurahan dianggap kurang efisien dan efektif dikarenakan susunan struktur organisasi pada perpustakaan desa/kelurahan di

Kecamatan Mallusetasi tidak sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dimana hanya ada satu orang penyelenggara yang mengurus jalannya Perpustakaan Desa/Kelurahan tersebut dan sebagian besar bukan seorang pustakawan. Selain permasalahan Struktur Organisasi pada Perpustakaan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mallusetasi, perihal sarana dan prasarana juga masih belum maksimal. Dilihat dari kurang lengkapnya koleksi buku-buku/sumber literasi dan lokasi pada Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi juga kurang representatif dikarenakan keberadaannya menyatu dengan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan pada kantor desa/kelurahan serta Perpustakaan Desa/Kelurahan tersebut tidak menghadirkan inovasi agar lebih menarik di mata masyarakat dan kurangnya kegiatan dalam menyebarkan informasi tentang keberadaan perpustakaan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Selanjutnya pada bagian pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak dilakukannya kegiatan supervisi sebab hanya satu pengelola sama halnya dengan pelaporan. Jadi, pengawasan dan pelaporan hanya dilakukan oleh kepala desa/lurah dikarenakan hal yang sudah disebutkan diatas, dan yang terakhir mengenai penganggaran penyelenggaraan perpustakaan dianggap suatu hal yang bermasalah dikarenakan anggaran mengenai pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi ternyata ada beberapa

desa/kelurahan tidak memasukkan ke dalam anggaran keuangannya, dimana seharusnya penganggaran penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan dan anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, sedangkan anggaran kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

Wujud kerja sama yang baik antara dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Barru dan juga perpustakaan desa/kelurahan menjadi harapan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan melalui pembinaan dan pengelolaan yang dilakukan. Namun kenyataannya pada kegiatan pembinaan/pelatihan kepada pengurus perpustakaan hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi bukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru. Pengelolaan yang berupa penyaluran buku hanya diadakan satu kali yaitu pada awal dibentuknya perpustakaan desa atau kelurahan. Adapun penambahan buku dilakukan apabila ada buku yang hilang. Kemudian dalam hal pengawasan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan pemerintah kabupaten barru terhadap perpustakaan desa atau kelurahan masih kurang massif. Begitupun kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh perpustakaan-perpustakaan desa atau kelurahan masih belum terbilang belum maksimal dikarenakan pelaporan tiap perpustakaan desa/kelurahan tidak konsisten dalam hal waktu pelaporan.

Adanya masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan terfokus pada Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan serta Bagaimana pola kemitraan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul: **Analisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan peneliti dilatar belakang, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana pola kemitraan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru
2. Untuk Mengetahui pola kemitraan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi akademis, penelitian ini berguna untuk menambah bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu Pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan dalam hal pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dan fungsi pemberdayaan dari pemerintah, dengan melihat bagaimana pemerintah membuat masyarakat berdaya dari segi pendidikan dengan membuat kebijakan mengenai pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru di bidang ilmu kepastakaan.

2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan pola kemitraan antara Dinas Perpustakaan Kabupaten Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep yang di pergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1 Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa/analisis memiliki beberapa definisi. Analisa merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb) dan analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis juga merupakan proses pemecahan persoalan yg dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.⁷

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*

2.2 Pentingnya Perpustakaan

2.2.1 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang didalamnya ada organisasi. Sebab, tanpa organisasi ini perpustakaan tidak beda dengan individunya. Artinya, perpustakaan merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu saling bekerja sama (terorganisasi)⁸. Perpustakaan merupakan salah satu sumber mengajar dan sumber belajar yang penting serta berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Perpustakaan sebagaimana yang ada dan berkembang sekarang, telah digunakan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian khazanah budaya bangsa, serta memberikan berbagai jasa layanan lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia perpustakaan diartikan sebagai kumpulan buku-buku (bahan bacaan, dsb). Secara bahasa, “perpustakaan” berasal dari kata “pustaka” yang berarti buku. Pustaka ialah buku atau kitab, perpustakaan, kemudian beberapa buku dari berbagai bentuk dan macam⁹. Dalam bahasa asing dikenal dengan istilah “library (Inggris), liber atau libri (Latin), bebliotheek (Belanda), bibilothèque (Perancis), biblioteca (Spanyol) dan biblia (Yunani)”

⁸ Wiji Suwarno, *Perpustakaan & Buku*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*

Darmono memberikan definisi bahwa perpustakaan sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Perpustakaan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perpustakaan desa Cilellang dan dikelola serta dimanfaatkan oleh masyarakat desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

2.2.2 Pentingnya Perpustakaan

Pentingnya Perpustakaan yaitu sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak, dan karya rekam lainnya. Serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Pentingnya Perpustakaan dapat dilihat dari tujuan dari kemerdekaan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup cerdas. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk membebaskan warga negaranya dari

kebodohan dan keterbelakangan, sekaligus juga berkewajiban menjamin dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Masyarakat membutuhkan sarana untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan serta pengetahuannya agar hidupnya menjadi semakin cerdas, berkualitas dan mampu berkompetisi dalam percaturan global. Pentingnya perpustakaan juga dapat dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sulistyobasuki (1991) memberikan gambaran fungsi perpustakaan sebagai berikut :

- a. Fungsi simpan karya, yaitu fungsi perpustakaan untuk menyimpan buah karya masyarakat. Bentuk karya yang disimpan adalah yang berkaitan dengan buku, majalah, surat kabar, atau informasi terekam lainnya. Perpustakaan berfungsi sebagai "arsip umum" bagi produk masyarakat berupa buku dalam arti luas. Namun, kini menurut Suwarno (2010), perpustakaan tidak hanya untuk media simpan saja, tetapi juga menjadi media penyimpan dan penyaji suatu karya yang dikelola kepada masyarakat pemustaka.
- b. Fungsi informasi, yaitu fungsi perpustakaan yang memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pemustaka tentang sesuatu hal yang diperlukan. Pada fungsi ini, anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat

meminta atau menanyakannya ke perpustakaan terutama mengenai substansi informasi yang dikelolanya. Informasi yang dikelola berupa informasi ilmiah atau informasi lainnya yang dianggap wajar untuk dikonsumsi masyarakat. Karena perkembangan pemikiran dan kebutuhan, fungsi informasi ini lebih ditekankan kepada pemberdayaannya. Dengan demikian, diharapkan pemustaka ini mampu mengoptimalkan informasi yang didapat dari perpustakaan menjadi informasi baru yang dapat diakses oleh pemustaka lain.

- c. Fungsi pendidikan, yaitu fungsi perpustakaan yang menunjang sistem pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perpustakaan sudah saatnya menjadi pusat sumber belajar, dan penelitian masyarakat. Artinya, fungsi perpustakaan bukan semata sebagai pendukung kurikulum pendidikan, melainkan lebih dari itu: menjadi tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat. Pasal 2 UU No. 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Dalam ayat lain pun dijelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka serta memperluas

wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- d. Fungsi rekreasi, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat yang menjadi rekreasi bagi pemustakanya dengan memberikan fasilitas yang baik dan bacaan yang sifatnya menghibur. Akan tetapi, sekarang penekanannya bukan hanya rekreasinya, melainkan rekreasi dan re-kreasi, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat yang nyaman dan menyajikan informasi-informasi yang sifatnya menyenangkan, serta sebagai tempat yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karya-karya orang lain yang telah dipublikasikan.
- e. Fungsi kultural, yaitu fungsi perpustakaan sebagai media dalam rangka melestarikan kebudayaan bangsa. Pola pikir ini kemudian berkembang ke arah mengembangkan kebudayaan, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan melalui penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatannya, seperti pemutaran film documenter, belajar menari, les Bahasa, *story telling*, dan lain-lain¹⁰

2.3 Pengelolaan Perpustakaan

2.3.1 Pengelolaan

¹⁰ Wiji Suwarno, *Perpustakaan & Buku*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

- proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

2.3.2 Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Perpustakaan desa/kelurahan merupakan perpustakaan yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat. Jika dilihat dari aspek sosiologis. Perpustakaan desa/kelurahan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah tertentu. Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial, perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpola dan terlihat sebagai kegiatan rutin.

Pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang amat penting jika perpustakaan diharapkan dapat diterima keberadaannya oleh

masyarakat. Minimal ada tiga faktor penting dalam pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan (Theresia, 2011) yakni :

a. Faktor pertama adalah tempat.

Tempat, merupakan hal yang penting. Tempat menentukan masalah akses. Jauh dan susahya mendapatkan bahan bacaan menjadi salah satu sebab jauhnya masyarakat desa pada buku. Terlebih jika perpustakaan berada di dekat balai desa yang posisi atau lokasinya terpencil atau terpisah dari pusat keramaian desa/kelurahan. Menurut peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada bagian sarana dan prasarana, lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan juga Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien.

b. Faktor kedua, koleksi dan pengelola

Sesuai dengan namanya, perpustakaan, tentu isinya adalah bahan bacaan atau pustaka. Menurut peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada bagian koleksi perpustakaan, Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki jumlah koleksi paling sedikit 1.000 judul, dan perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi. Untuk jenis koleksi buku, Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah. Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat. Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi. Kemudian, mengenai pengadaan bahan perpustakaan, Perpustakaan Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% dari total anggaran perpustakaan.

- c. Faktor ketiga, yang bisa mengefektifkan keberadaan perpustakaan desa/kelurahan adalah kegiatan perpustakaan itu sendiri.

Salah satu kendala besar mengajak masyarakat datang ke perpustakaan dan membaca buku karena mereka tidak menemukan keterkaitan yang erat antara bacaan dan aktivitas keseharian. Atas dasar anggapan tersebut, agar Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat berfungsi dengan baik, perlu dikelola dengan baik dengan menyediakan bacaan yang bersifat keaksaraan fungsional. Masyarakat perlu disediakan bahan bacaan yang sesuai dengan mata pencaharian mereka, oleh sebab itu perpustakaan perlu dilengkapi dengan bacaan tentang aktivitas kehidupan masyarakat. Atau jika masyarakat lebih bersifat majemuk dengan berbagai mata pencarian, penuhi mereka dengan bacaan sesuai dengan kebutuhannya.

2.4 Standar Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Standar Pengolahan perpustakaan Desa adalah pekerjaan yang diawali sejak koleksi diterima di perpustakaan sampai dengan penempatan di rak yang telah disediakan. Dalam pengolahan terdapat kegiatan berupa inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, pengecapan, pembuatan perlengkapan perpustakaan, penjajaran kartu dan penyusunan koleksi di rak. Untuk pengelolaan perpustakaan desa terdapat dua standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) yaitu SNI

7596:2010 (BSNI, 2010) dan oleh Perpustakaan Nasional SNP 005:2011 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Standar ini menjadi acuan pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan di Indonesia. Dalam SNP tentang perpustakaan desa dijelaskan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan.¹¹

2.5 Standar Nasional Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pengelolaan perpustakaan menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada Pasal 2 yang mengatur tentang 6 Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan¹².

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Mencakup 6 standar antara lain :

- 1) Standar koleksi perpustakaan
- 2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan
- 3) Standar pelayanan perpustakaan
- 4) Standar tenaga perpustakaan
- 5) Standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
- 6) Standar pengelolaan perpustakaan

¹¹ Darmono. "Standar pengelolaan perpustakaan Desa/Kelurahan sesuai dengan SNP 005:2011". (Universitas Negeri Malang 24 Februari 2016), hlm: 6.

¹² Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan pada Pasal 2

Dari 6 Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, Standar Pengelolaan Perpustakaan menjadi representasi keempat standar lainnya. Pada bagian Pengelolaan Perpustakaan dijelaskan:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan penentuan apa yang harus dikerjakan untuk merealisasikan.

- a. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang terperinci, implementasi biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

- a. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- b. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat

mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut.

- a. Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah hal yang dilaporkan terhadap pelaksanaan tugas perpustakaan itu sendiri.

- a. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah desa.
- b. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

5. Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan adalah anggaran yang di gunakan untuk penyelenggaran bahan-bahan perpustakaan, bukubuku dan koleksi bahan lainnya.

- a. Perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan. Kepala Perpustakaan Kepala Desa/Lurah Pelayanan Teknis Pelayanan Pemustaka

- b. Pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan
- c. Anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, anggaran perpustakaan kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh dari sumber lain yang tidak mengikat.
- d. Kepala Perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

2.6 Pola Kemitraan/Hubungan Kerja

Kemitraan sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan bagi para pihak dengan kesamaan orientasi yang ingin menghemat energi dan menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha

tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah proses interaksi dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama. Pihak-pihak yang melakukan kemitraan meliputi berbagai sektor seperti kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Beberapa pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.

Hubungan kerja merupakan faktor yang sangat dominan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hubungan kerja harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Model-model, Bentuk, dan Sifat Kemitraan Model-model kemitraan dikembangkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam hubungan kerjasama antar organisasi. Menurut Sulistiyani (2004) terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi, yakni :

- a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara

benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

- b. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistik. Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.
- c. Conjugation partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antarorganisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati kemudian dituangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian kerja (Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti, 2008:16). Adapun kemitraan yang terjalin antarorganisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012). Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka konsep yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dijadikan acuan dalam penelitian dikarenakan melalui Undang-Undang ini diketahui bahwa Perpustakaan desa/Kelurahan

masuk kedalam kategori Perpustakaan umum, dimana perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang tertuang pada BAB VII Jenis-jenis Perpustakaan Pasal 22. Selanjutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan dimana dalam keputusan menteri tersebut lebih spesifik membahas mengenai Perpustakaan Desa/Kelurahan dalam hal pengelolaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang terakhir dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dimana aturan tersebut menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu pada bagian Pasal 2 Mengenai 6 Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan yang lebih spesifik ke Standar Pengelolaan Perpustakaan dikarenakan menjadi representasi dari kelima standar lainnya.

Dari ketiga Aturan tersebut yang menjadi acuan, kita dapat menganalisis Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan melihat bagaimana Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dari segi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran penyelenggaraan perpustakaan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru serta melihat bagaimana Pola kemitraan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten

Barru dengan Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru melalui salah satu model kemitraan dan beberapa wujud kerjasamanya berupa Pembinaan/Pelatihan, Pengembangan, Pemberdayaan, Evaluasi dan Koordinasi.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut maka dapat disusun suatu Kerangka Konsep yang dijabarkan melalui skema berikut:

Gambar 1 : Bagan Kerangka Konsep

